



RANCANGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2023

DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 973/76A/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 35 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal **11** Agustus 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kota Dumai yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja.

Diharapkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kota Dumai pada masa sekarang dan yang akan datang.

Dumai, 5 Juni 2023



W. M. H. A. LAGAN, S.H, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720412 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	12
BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

1. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 8
2. Pemetaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 13
3. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023 17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja memiliki kedudukan strategis dalam menjebatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Dumai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan disetiap tahun anggaran. Pada tahun 2023 ini, Dinas Perikanan Kota Dumai menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah TAHUN 2023.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sesuai dengan situasi perkembangan, yang meliputi:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran berlebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2023;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambagan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan adanya acuan tersebut, perubahan Renja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2021 nomor 4 seri E);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 22 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perikanan Kota Dumai (Berita daerah Kota Dumai Tahun 2022 nomor 22 seri D);

15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya dokumen perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 ini sebagai acuan antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2023 yang berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 guna terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam sinkronisasi RKPD Kota Dumai Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kota Dumai;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023; dan
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Bentuk penyajian perubahn Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, perubahan Renja Tahun 2023 disusun secara sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi Renja dilakukan guna untuk mengetahui :

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan ;
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra ; dan
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan Dinas Perikanan Kota Dumai. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja menjelaskan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023 dengan memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capain kinerja penyelenggaraan pemerintah menggambarkan tentang pencapai kinerja.

Sampai dengan pertengahan bulan Juni Triwulan II Tahun 2023, penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai masih sangat rendah, yaitu sebesar 41.78% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 42.98%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pekerjaan yang proses pengajuan administrasi pembayaran dilaksanakan pada triwulan III dan

triwulan IV. Adapun hasil pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Setuan	Target Kinerja Anggaran RIKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RIKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RIKPD Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														I
3	Urusan Pemerintahan Pilihan													
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan												
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota		5,368,578,029		1,047,744,191		1,473,421,532		2,521,165,723			
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,989,000				8,960,000		8,960,000			
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	72,989,000	0.75	8,960,000	0.75	8,960,000	18.75	12.28
3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,018,181,368		539,198,324		1,004,356,513		1,543,554,837			
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	22	3,018,181,368	5.5	539,198,324	6.5	1,004,356,513	12	54.55
3	25	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52,616,830		5,400,000		11,580,000		16,980,000			
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	52,616,830	0.5	5,400,000	0.6	11,580,000	1.1	55.00
3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363,237,789		124,603,595		112,034,301		236,637,696			
3	25	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palet	4	6,458,400	1	1,500,000	1	3,000,000	2	50.00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Di realisasi (2023) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	I			II			K	Rp	K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	121,751,689	0.5	12,244,245	2.3	72,362,500	2.8	84,806,745	70.00	69,66		
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	12,990,000	1.25	5,000,000	1	1,900,000	2.25	6,900,000	56.25	53.12		
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10,699,700	1.25	4,830,610	1	1,360,000	2.25	6,190,610	56.25	57.86		
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	6,720,000	0.1	880,000	0.35	1,540,000	0.45	2,420,000	45.00	36.01		
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	204,618,000	0.43	100,148,540	0.25	33,171,801	0.68	133,320,341	68.00	65.16		
3 25 01 2.07 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	501,108,206	1	125,160,000		24,300,000		149,460,000	100	99.96		
3 25 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	151,194,000							0	0		
3 25 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	24,824,270			4	24,300,000		24,300,000	100	97.89		
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	199,881,936							0	0		
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	2,535,000	0.25	500,000			0.25	500,000	25.00	19.72		
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	214,999,700	0.25	39,675,620	0.25	43,154,348	0.5	82,829,968	50.00	38.53		
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	695,968,630	0.25	161,493,398	0.35	251,495,770	0.6	412,989,168	60.00	59.34		

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang Diwujudkan (2023) Murnai		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Ewaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
						K	Rp	K	Rp				
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	9	446,941,506	51,713,454	17,540,600	69,254,054	44.44	43.34			
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	134,778,000	40,875,684	17,540,600	58,416,284	44.44	43.34			
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	32,680,000	10,837,770		10,837,770	37.50	33.16			
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	279,483,506				0	0			
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan			213,726,500	27,900,000		27,900,000					
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok	18	213,726,500	27,900,000		27,900,000	27.78	13.05			
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	5	213,726,500	27,900,000		27,900,000	27.78	13.05			
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya			1,560,394,798	43,879,600	418,697,000	462,576,600					
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	Kelompok	10	690,953,879				0	0			
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	10	690,953,879				0	0			
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Unit		869,440,919	43,879,600	418,697,000	462,576,600					
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	546,571,300		292,173,000	292,173,000	60.00	53.46%			

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Di realisasi (2023) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
						K	Rp	K	Rp				
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di area 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	200,539,119	0.65	126,524,000	0.65	126,524,000	65	63.09		
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemanfaatan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemanfaatan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	250	127,330,500	100	43,879,600	100	43,879,600	40.00	35.87		
3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan			74,999,300		3,996,800		3,996,800				
3 25 06 2.03	Penyuluhan dan Penyuluhan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penediaian dan Penyuluhan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			74,999,300		3,996,800		3,996,800				
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	0.1	74,999,300	0.015	3,996,800	0.015	3,996,800	15	5.33		

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kota Dumai. Proses penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen perubahan Renja dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi dalam upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi (Tabel 1), perubahan Renja tahun 2023 memuat perubahan dan pergeseran anggaran kegiatan. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian/pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbasis kinerja dan tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berikut hasil pemetaan rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 (Tabel 2).

Tabel 2. Pemetaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina
Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel aki
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 7.217.698.627,- (*tujuh milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*). Namun, angka tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi pelaksanaan Program dan Kegiatan perubahan di Dinas Perikanan Kota Dumai. Pagu anggaran yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. 8.664.323.037,- (*delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah*) atau tambahan sebesar Rp. 1.446.624.410,- (*satu milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah*). Rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2023 serta pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, terjadi penambahan anggaran hampir di setiap sub kegiatan, karena untuk mencukupi kebutuhan Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 1 (satu) tahun anggaran. Salah satu penambahan pagu rutin terbesar adalah pemenuhan honorarium tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK) di Dinas Perikanan Kota Dumai. Sebelumnya, honorarium yang dianggarkan hanya untuk 8 (delapan) bulan. Selain itu, adanya kenaikan honorarium dari TKPK Non Penyuluh PNS dan Petugas Pembenuhan. Sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk memenuhi pembayaran honorarium TKPK selama 12 bulan.

Ada beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan di APBD 2023 murni, kemudian dianggarkan pada APBD-P 2023. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

1. *Service* tambak di UPT Budidaya Air Payau pada sub kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat. Kegiatan ini dilakukan untuk rehabilitasi tambak yang akan dilakukan uji coba budidaya udang pada Tahun Anggaran 2024.
2. Pembangunan lahan parkir Dinas Perikanan. Pembangunan lahan parkir ini terdapat pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Hal ini dianggap penting, karena Dinas Perikanan tidak memiliki lapangan parkir yang layak.
3. Pengadaan Mebel Kantor. Mebeleur yang dimiliki Dinas Perikanan Kota Dumai, kondisinya sudah tidak layak pakai dan perlu dilakukan pengadaan mebeleur baru untuk mendukung kegiatan di Dinas Perikanan Kota Dumai.
4. Rehab kantor terutama bagian secretariat serta program, keuangan dan aset. Rehab wajib dilakukan karena ruangan sering banjir saat hujan.

Tabel 3. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH		CATATAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA/A	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN	%	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah			7.217.698.627	8.664.323.037	1.446.624.410			
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			5.368.578.029	6.375.642.658	1.007.064.629			
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	72.989.000	83.719.000	10.730.000			
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			3.018.181.368	3.018.181.368	-			
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Perikselesian Tugus ASN	orang/bulan	22	3.018.181.368	3.018.181.368	-	0,00%		
3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			52.616.830	56.136.830	3.520.000			
3 25 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	52.616.830	56.136.830	3.520.000	6,69%	Penyesuaian kebutuhan anggaran untuk kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD	
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			365.237.789	510.094.000	146.856.211			
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.458.400	10.000.000	3.541.600	54,84%	Penyesuaian kebutuhan kantor selama 12 bulan	
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	121.751.689	165.000.000	43.248.311	35,52%	Penyesuaian kebutuhan kantor selama 12 bulan	
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.990.000	20.070.000	7.080.000	54,50%	Adanya peningkatan volume rapat di Dinas Perikanan	
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.699.700	24.000.000	13.300.300	124,31%	Penyesuaian kebutuhan kantor selama 12 bulan	
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	6.720.000	6.720.000	-	0,00%		
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	1	204.618.000	284.304.000	79.686.000	38,94%	Adanya peningkatan koordinasi dan	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH		CATATAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN	%	
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			501.108.206	801.487.134	300.378.928			konsultasi yang dilaksanakan
3 25 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	125.208.000	125.208.000	-	0,00%		
3 25 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	6	151.194.000	151.194.000	-	0,00%		
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0	-	83.000.000	83.000.000			Banyak mebel kantor yang tidak layak pakai
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	24.824.270	49.648.270	24.824.000	100,00%		Penambahan AC untuk kebutuhan kantor
3 25 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	199.881.936	199.881.936	-	0,00%		
3 25 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	-	192.554.928	192.554.928			Pengadaan sarana parkir di Dinas Perikanan
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	913.503.330	1.248.116.820	334.613.490			
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.535.000	2.535.000	-	0,00%		
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	214.999.700	214.999.700	-	0,00%		
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	695.968.630	1.030.582.120	334.613.490	48,08%		penambahan honorarium TKPK selama 4 bulan dan ada kenaikan gaji dari TKPK tertentu seperti: penyuluh non PNS dan Petugas Pembinaan
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			446.941.506	657.907.506	210.966.000			
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajalnya	Unit	9	134.778.000	145.744.000	10.966.000	8,14%		Penyesuaian kebutuhan service kendaraan dinas dan operasional
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	32.680.000	32.680.000	-	0,00%		
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	279.483.506	479.483.506	200.000.000	71,56%		Rehab ruang sekretariat dan PKA

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH		CATATAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN	%	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbiasa			213.726.500	222.726.500	9.000.000			
3 25 03	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Diarah Daerah Kabupaten/ Kota			213.726.500	222.726.500	9.000.000			
3 25 03	2.02	02	Kelompok	18	213.726.500	222.726.500	9.000.000	18	4,21%	Peningkatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada kelompok nelayan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbiasa			1.560.394.798	1.969.953.879	339.559.081			
3 25 04	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil yang terbiasa			690.953.879	690.953.879	-			
3 25 04	2.02	01	Kelompok	10	690.953.879	690.953.879	-	10	0,00%	
3 25 04	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			869.440.919	1.279.000.000	409.559.081			
3 25 04	2.04	02	Unit	1	546.571.300	687.000.000	140.428.700	1	25,69%	Penyesuaian dengan kebutuhan UPT Budidaya Ikan Air Tawar
3 25 04	2.04	04	Dokumen	1	200.539.119	2.10.000.000	9.460.881	1	4,72%	Penyesuaian kebutuhan dengan kegiatan KESLING
3 25 04	2.04	05	Orang	250	122.330.500	132.000.000	9.669.500	250	7,90%	Peningkatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada kelompok budidaya
3 25 04	2.04		Ha	0	-	250.000.000	250.000.000	0,24		APED-P 2023 rencana akan dilakukan rehabilitasi tambak sebelum dilakukan uji coba
3 25 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel aidi			74.999.300	96.000.000	21.000.700			
3 25 06	2.03	01	Ton	0,1	74.999.300	96.000.000	21.000.700	0,1	28,00%	Sosialisasi Cermatikan
3 25 06	2.03	01			74.999.300	96.000.000	21.000.700			

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya, perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dokumen perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Selain memperhatikan keselarasan, dokumen perubahan ini disusun supaya isu dan permasalahan Kota Dumai secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Dumai, 5 Juni 2023



KEPALA,

M. APRILAGAN, S.H, M.Si
NIP. 19720412 200112 1 003